

POINTERS KONFERENSI PERS
Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2016-2019
“kerja belum selesai”

Selasa, 17 Desember 2019

1. Pertama sekali, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan media yang selalu menjadi rekan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas. Setiap tahun, KPK selalu mendapat banyak perhatian. Dalam empat tahun terakhir, ternyata isu yang paling mendapat perhatian adalah Kasus Korupsi E-KTP. Terlihat bulan September adalah bulan dengan pemberitaan tertinggi akibat revisi UU KPK dan pergantian pimpinan.
(INFOGRAFIS Pemberitaan Media)
2. Meski periode kepemimpinan kami berakhir beberapa hari lagi, namun kerja-kerja dan upaya pemberantasan korupsi akan tetap berjalan. Masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Perjuangan melawan korupsi juga tidak akan berhenti karena pergantian jabatan. Kami yang sudah purna menjadi pimpinan KPK, akan tetap berjuang melawan korupsi meskipun tidak berada di KPK. Jadi, ini belum usai...
3. Konferensi Pers ini dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban KPK pada publik. KPK dapat bekerja karena dipercaya dan diharapkan masyarakat, sekaligus menggunakan anggaran dari APBN yang tentu juga berasal dari rakyat Indonesia. Karena itu, kami perlu menyampaikan secara terus menerus pertanggungjawaban kinerja KPK pada publik. Kami harapkan juga agar seluruh pihak terkait dapat mencermati informasi ini agar dapat memahami secara utuh, komprehensif dan tidak sepotong-potong.
4. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki 5 tugas, yaitu: koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan dan monitoring. Seluruh tugas ini dilaksanakan secara proporsional dan terencana.

MONITORING & PENCEGAHAN KORUPSI

5. Dari fungsi monitoring dan pencegahan korupsi, KPK menyelamatkan potensi kerugian negara dan / atau pendapatan negara sejumlah total Rp63,8 Triliun.
6. **Fungsi monitoring** kami laksanakan dengan melakukan studi, kajian, pengukuran, pengembangan, dan tindak lanjut. Sektor yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat banyak adalah sektor yang menjadi perhatian KPK, misal: Sektor Kesehatan, Sumber Daya Alam, dan Pangan, yaitu kajian tentang impor bawang putih
(INFOGRAFIS LITBANG)
7. **Pada sektor kesehatan**, ada dua kajian besar yang dilakukan, yaitu: Kajian Pengadaan Alat Kesehatan dan Kajian Jaminan Kesehatan Nasional.

Dari kajian di sektor Kesehatan ini, **pontensi kerugian keuangan negara yang dapat diselamatkan adalah Rp18, 15 Triliun;**

a. Kajian Pengadaan Alat Kesehatan

- i. *E-catalogue* sebagai solusi belum optimal karena jumlah alat kesehatan dan penyedia relatif sedikit (penyediannya hanya ada 7% dan produknya hanya 35%).
- ii. Selain itu, Pengadaan Barang dan Jasa secara konvensional untuk pengadaan alat kesehatan masih banyak (transaksi *e-catalogue* hanya 58%).
- iii. **Dalam kajian ini, KPK memberi 4 saran perbaikan:**
 - Pembentukan komponen pembentuk harga dasar untuk dasar negosiasi harga tayang oleh LKPP.
 - Kementerian Kesehatan dan LKPP membuat cetak biru pemenuhan alat kesehatan di *e-catalogue* (peningkatan jumlah produk dan penataan konten).
 - Penutupan fitur negosiasi, diganti menjadi fitur pilihan (komponen harga tambahan dan pembelian jumlah besar).
 - Penyempurnaan regulasi untuk menjadi pedoman penilaian kebutuhan dan pemilihan alat kesehatan.

b. Kajian Jaminan Kesehatan Nasional

- I. Potensi Fraud
 - *Fragmentasi/unbundling*: kesengajaan memecah pelayanan medis
 - *Phantom billing*: tagihan biaya tanpa pelayanan
 - *Unnecessary treatment*: tindakan medis yang tidak diperlukan pasien
- II. Atas temuan pada objek piloting, KPK memberikan **rekomendasi-rekomendasi** berikut :
 - KPK mendorong RS pemerintah dan swasta provider JKN seluruh Indonesia untuk menyampaikan Rencana Kebutuhan Obat agar *claim* obat pada JKN transparan & akuntabel, **berpotensi menyelamatkan Rp18 Triliun**
 - Mendorong penyelesaian tunggakan luran Wajib dalam program JKN dengan mengeluarkan surat kepada sejumlah Pemda (19 Pemprov & 2 Pemkot) untuk tempo pembayaran 2004-2017, **menyelamatkan Rp114 Milyar.**
 - KPK melakukan *piloting* 3 wilayah, ditemukan 4 dari 6 rumah sakit tidak sesuai penetapan kelasnya, kajian ini **berpotensi menyelamatkan uang negara sebesar Rp 33 Milyar dalam setahun**

8. Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam

GNP-SDA merupakan kelanjutan dari berbagai kegiatan KPK di sektor sumber daya alam.

Kegiatan ini dimulai secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari tahun 2009 hingga saat ini.

Selama 4 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 – 2019 terdapat potensi pendapatan dan penyelamatan keuangan negara sejumlah **total Rp16,17 Triliun;**

Berikut kajian yang sudah dilakukan oleh KPK selama 4 tahun terakhir:

a. Tahun 2016

- i. Kajian Perkebunan
- ii. Kajian Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air

b. Tahun 2017: Kajian Sistem Pengelolaan Kawasan Hulu Sumberdaya Air

c. Tahun 2018: Kajian Sistem Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

- d. **Tahun 2019:** KPK bersurat kepada Presiden terkait dengan Perusahaan Pertambangan Batubara. Dalam surat ini, KPK mempertimbangkan beberapa aturan dalam revisi PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- i. KPK Menetapkan Aksi Taktis dan Aksi Strategis dan Sistematis
- ii. **Aksi Statis** untuk menyelesaikan persoalan PSDA yang aktual dalam jangka pendek.
- Membangun sistem informasi yang terintegrasi sebagai instrumen pengendalian.
 - Rekonsiliasi informasi dan data.
 - Audit kepatuhan dan koordinasi penataan kewajiban.
- iii. **Aksi Strategis** untuk membangun sistem pengendalian korupsi, sementara sistematis secara komprehensif membenahi tata kelola SDA.
- iv. Gerakan GNPSDA membutuhkan **komitmen keberlanjutan** untuk tetap menjaga tata kelola SDA berjalan di jalur yang benar. KPK telah menetapkan **arah dan strategi GNPSDA** selanjutnya:
- Pengelolaan SDA yang berkeadilan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - Mengatasi ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan SDA;
 - Optimalisasi nilai manfaat SDA untuk kemakmuran rakyat dan berkeadilan;
 - Pengelolaan pajak sektor SDA yang bersih, bebas korupsi, dan berkeadilan;
 - Mengatasi benturan kepentingan dan penyanderaan negara (*state capture*) dalam urusan SDA;
 - Transparansi dan partisipasi publik sebagai prasyarat utama pengelolaan SDA;
 - Penegakan hukum yang berdampak terhadap pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup.
- v. **Dari aksi GNPSDA ini** menghasilkan:
- Peningkatan potensi penerimaan pajak batu bara di Kalimantan Timur di tahun 2019 (dari DJP & DJBC) **senilai Rp400 Milyar**
Hal ini sebagai efek dari rekomendasi berupa mendorong revisi terkait dengan kewajiban pembayaran royalti batubara
 - Mendorong implementasi sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hasil Hutan dan Produksi Lestari (PHPL) KLHK sejak tahun 2016 hingga 2018 menghasilkan **peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari hutan senilai Rp3,4 Triliun**
 - Mendorong Penerbitan 67.546 surat permintaan penyelesaian atas data dan/atau keterangan (SP2DK) atas wajib pajak sektor kelapa sawit sejak tahun 2017 sehingga **meningkatkan penerimaan pungutan pajak kelapa sawit hingga Rp11,9 Triliun**
 - Menghentikan pemberian pembebasan bea masuk pajak dan cukai untuk barang konsumsi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta perbaikan mekanisme pemberian insentif di kawasan bebas dan pelabuhan bebas **dapat menambah potensi penerimaan pajak sebesar Rp457 Milyar**
- vi. Kami berharap arah dan **strategi GNPSDA ini bisa dilanjutkan oleh pimpinan KPK mendatang** dan menguatkan kerja sama yang sudah dilakukan dengan para pemangku kepentingan lainnya.

9. Kajian Impor Bawang Putih

- KPK telah melakukan kajian terhadap Komoditas Pangan Strategis, Bawang Putih selama tahun 2017.
- Temuan KPK, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu:
 - i. belum adanya disain kebijakan yang komprehensif dari kementerian pertanian dalam membangun swasembada komoditas bawang putih.
 - ii. Dukungan informasi atas lahan-lahan pertanian yang secara riil bisa dipergunakan dalam mewujudkan swasembada bawang putih belum optimal.
 - iii. Perbaikan pada spek pelaksanaan meliputi belum optimalnya peran pemerintah dalam mengevaluasi kewajaran kenaikan harga bawang putih di pasar dan pada aspek pengawasan yaitu belum optimalnya pengawasan kementerian perdagangan terhadap distribusi penjualan bawang putih impor.
- **Rekomendasi KPK** dalam pembenahan tata niaga komoditas bawang putih adalah
 - i. **Aspek perencanaan**, yaitu membuat kesepakatan bersama antara Kementerian terkait dan menurunkan ke Dinas kabupaten terkait ke pemerintah untuk membuat pelaksanaan komitmen menyukseskan swasembada.
 - ii. Merekomendasikan Kementerian Pertanian **membuat *grand design* menyeluruh tentang swasembada bawang putih** dari produksi hingga pasca panen.
 - iii. Dalam **tahap pelaksanaan** adalah agar Kementerian Perdagangan menyusun acuan untuk menilai kelayakan harga komoditas bawang putih impor di tingkat konsumen melakukan revisi Permendag Nomor 20 tahun 2017 untuk memasukan bawang putih sebagai daftar kebutuhan pokok yang wajib dilaporkan distribusinya dan melakukan post audit atas laporan stok distributor dari aspek pengawasan.

10. Survei Partisipasi Publik

Survei ini mengukur persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat mengenai korupsi dan KPK.

Hasilnya terlihat indeks partisipasi publik mengenai korupsi dan KPK berada di skor 59,52 yang termasuk dalam kategori **Cukup**.

(INFOGRAFIS SURVEI PARTISIPASI PUBLIK)

11. Survei Penilaian Integritas

- Selain membantu instansi pemerintahan melalui kajian di sektor-sektor tertentu, KPK juga melakukan Survey Penilaian Integritas untuk membantu instansi memetakan titik rawan di instansi masing-masing sehingga upaya perbaikan dapat dilakukan lebih fokus dan efektif;
- Survei ini **mengukur risiko korupsi** di 36 instansi/ kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah.
- Penilaian Integritas sebagai salah satu upaya pencegahan yang dilakukan untuk mendorong kesadaran akan resiko korupsi. Instansi diharapkan dapat melakukan penilaian secara mandiri sebagaimana praktik yang dilakukan oleh Kemenkeu dan OJK.
- Kegiatan Survei Penilaian Integritas dilakukan dan ditujukan untuk mendorong kesadaran resiko korupsi di instansi. Hal ini dilakukan melalui pemetaan resiko korupsi

dalam budaya organisasi, pengelolaan SDM, Pengelolaan Anggaran dan Sistem Anti Korupsi. Penilaian dilakukan oleh diri sendiri (pegawai), oleh pihak eksternal (pengguna layanan)

- Hasil survei kemudian digunakan sebagai dasar untuk mendorong kegiatan perbaikan integritas dan anti korupsi di sektor publik oleh K/L/O/P maupun instansi terkait.
- **KPK mengharapkan hasil kegiatan ini dapat ditindaklanjuti** dengan kegiatan-kegiatan nyata untuk membangun sistem pencegahan di instansi sehingga menjadikan instansi yang menjadi mitra KPK saat ini menjadi agen perubahan dalam mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi.

FUNGSI PENCEGAHAN KORUPSI

12. Dalam menjalankan fungsi pencegahan, mulai tahun ini, KPK mendirikan **Pusat Edukasi Antikorupsi** yang berpusat di Gedung KPK C1. Kesan seram gedung KPK lama ini sekarang telah berubah menjadi penuh warna yang ceria dan hangat. Siapa saja boleh datang untuk belajar tentang antikorupsi di sana.

Di bawah Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-corruption Learning Center, kami mendorong berdirinya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bersama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Melalui LSP, telah lahir penyuluh-penyuluh antikorupsi. **Hingga saat ini ada 806 Penyuluh Antikorupsi Tersertifikasi, yaitu:**

- 745 tingkat Pratama
- 29 tingkat madya
- 32 tingkat utama

Terdiri dari 54 pegawai KPK dan 752 yang bukan pegawai KPK.

(INFOGRAFIS PENYULUH TERSERTIFIKASI)

13. Masih dalam fungsi pencegahan, KPK terus berupaya meningkatkan **kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Negara**. KPK menganggap ini adalah salah satu program yang sangat penting karena LHKPN adalah salah satu indikator transparansi seorang penyelenggara negara. Tidak pernah ada larangan seorang penyelenggara negara memiliki banyak harta. Boleh saja, asal bisa dibuktikan asal hartanya. Sehingga rakyat bisa ikut mengawasi dan mengingatkan penyelenggara negara tentang kepemilikan hartanya.

KPK berupaya meningkatkan kepatuhan LHKPN dengan cara melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Selain itu, beberapa kali KPK khusus membuka pendaftaran di daerah-daerah tertentu. Salah satunya, KPK pernah membuka meja pendaftaran LHKPN di Lombok saat terjadi bencana.

Masih dalam upaya meningkatkan kepatuhan, saat ini, penyelenggara negara tidak perlu lagi datang ke KPK untuk melaporkan LHKPN. Dengan adanya eLHKPN, penyelenggara negara bisa melaporkan hartanya hanya dengan membuka laptop dari rumah.

(INFOGRAFIS)

14. Dalam melakukan fungsi pelayanan pendidikan kepada masyarakat, KPK memiliki beberapa program yang berkelanjutan dalam beberapa tahun ini.
- a. **PROFIT (Profesional Berintegritas)**

Pihak swasta menjadi salah satu perhatian utama dalam pencegahan korupsi karena pihak swasta menjadi pihak yang terlibat dalam setiap dugaan tindak pidana korupsi. Saat ini, KPK telah mendorong berdirinya Komite Advokasi Daerah di 34 provinsi. Komite Advokasi Daerah adalah forum komunikasi dan advokasi antara regulator dan pelaku usaha. Dalam forum ini, kedua belah pihak dapat menyampaikan dan menyelesaikan bersama kendala yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas. KPK juga telah menerbitkan dua buku pedoman antikorupsi:

- Panduan Teknis Pencegahan Sektor Usaha
- Pedoman Penanganan TPPU di Pasar Modal

b. Strategi Implementasi Partai Politik

- Pada tahun 2018, bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia, 16 partai peserta pemilu menandatangani dan sepakat untuk mengimplementasikan SIPP.
- Tahun 2019, kami merampungkan kajian tentang Bantuan Dana Partai Politik yang merekomendasikan negara memberi dana bantuan ke partai politik sebesar Rp16.922.
- Ada tiga argumen yang membuat KPK merekomendasikan hal tersebut:
 - Parpol merupakan salah satu institusi demokrasi yang penting dan strategis karena memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab melakukan rekrutmen politik, baik melalui mekanisme elektoral (pemilu legislatif, pemilu presiden. dan pilkada) maupun mekanisme nonelektoral.
 - Sebagai badan hukum publik yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab konstitusional yang begitu besar, parpol berhak memperoleh pembiayaan atau pendanaan oleh negara.
 - Demokrasi yang terkonsolidasi membutuhkan parpol yang juga solid dan sehat secara organisasi, demokratis secara internal, berintegritas, dan terinstitusionalisasi.
 - Pembiayaan parpol oleh negara secara signifikan diperlukan untuk mengambil alih kepemilikan sekaligus kepemimpinan parpol dari individu-individu pemilik uang, sehingga ke depan parpol benar-benar menjadi badan hukum publik yang dimiliki para anggota dan dipimpin secara demokratis oleh anggota sebagaimana semangat UU Partai Politik yang tak pernah terwujud dalam realitas politik.

c. Menanam Budaya Antikorupsi

Untuk menanamkan budaya antikorupsi pada publik, KPK berkeliling negeri menggunakan ikon **bus antikorupsi**. Selama tahun 2018-2019, kami berkeliling ke 30 kabupaten/kota dan mengajak 107.697 peserta untuk melakukan aktivitas yang menyelipkan nilai-nilai antikorupsi.

KPK bekerja sama dengan Kementerian terkait **memasukkan nilai antikorupsi pada mata pelajaran dan mata kuliah wajib umum di seluruh jenjang pendidikan**. Untuk jenjang SD, SMP, dan SMA mencapai 56.416 dan total program studi kampus mencapai 1.415

d. Penyelamatan Keuangan Negara dari Gratifikasi

Penyelamatan keuangan negara dari gratifikasi selama 4 tahun, baik berbentuk barang dan uang senilai **Rp159,3 miliar** terdiri dari : Rp 40,56 miliar berupa uang dan Rp 118,77miliar berupa barang.

e. Pengembangan Aplikasi JAGA

Melalui aplikasi JAGA, sejak 2016 masyarakat bisa memantau kualitas pelayanan publik. Meski baru empat sektor yang bisa diawasi, jumlah pengunduh dan penggunaanya terus bertambah.

FUNGSI KORDINASI DAN SUPERVISI

15. Koordinasi dan Supervisi Penindakan

Selama 2016-2019, kasus yang dikoordinasikan KPK dengan kepolisian dan kejaksaan mencapai 977 kasus. Selain koordinasi, KPK juga melakukan supervisi sebanyak 1.093 kasus dari kepolisian dan kejaksaan.

Tahun	Koordinasi	Supervisi
2016	167	201
2017	183	289
2018	327	264
2019	300	338
Total	977	1.093

Selain penanganan kasus melalui koordinasi dan supervisi, KPK juga membangun jaringan **SPDP Online** untuk mempermudah proses koordinasi dan supervisi. Ini adalah salah satu terobosan yang dilakukan KPK dalam melaksanakan fungsi ini.

(INFOGRAFIS SPDP ONLINE)

Koordinasi Supervisi Penindakan

Koordinasi

KPK melakukan koordinasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum lain dan belum selesai dalam waktu 1 tahun. Atau terdapat kendala baik dalam tahap penyidikan hingga tahap eksekusi.

Setelah memperoleh informasi dari APH terkait kendala tersebut, KPK kemudian melaksanakan gelar perkara bersama dengan APH untuk memetakan beberapa hal.

Supervisi

Setelah melalui tahap pemetaan tersebut, KPK kemudian melakukan supervisi terhadap penanganan perkara tersebut dan memberi fasilitas kepada APH yang bersangkutan, berupa:

- Kendala pemenuhan unsur kerugian negara dengan **memfasilitasi ahli pada tahap penyidikan maupun penuntutan**. Untuk memenuhi unsur ini, KPK melakukan cek fisik yang menjadi objek TPK sejak Unit Koordinasi dan Supervisi berdiri tahun 2017, KPK telah melakukan cek fisik dalam 17 perkara.
- Kendala pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum berupa **memfasilitasi pemeriksaan saksi-saksi**.
- Kendala pelacakan aset dalam **proses eksekusi**. Salah satu perkara yang menyita perhatian publik adalah Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Cadangan Batubara oleh PT. PLN Batubara yang bekerjasama dengan PT. Tandri Madjid Energy senilai Rp1,35 Triliun. Tindak Pidana Korupsi ini merugikan negara sebesar Rp477,35 Miliar selama 2011-2012 dengan terpidana Kokos Jiang yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kokos Jiang telah membayar uang pengganti senilai dengan kerugian negara ini ke pihak Kejaksaan Agung.

- Pada tahap penyidikan, KPK melakukan supervisi dan kegiatan fasilitasi keterangan ahli, cek fisik dan peninjauan lapangan serta penelusuran aset terhadap 107 (seratus tujuh) persil tanah lokasi tambang batubara PT TME yang terbagi menjadi 7 (tujuh) blok di Muara Enim Sumatera Selatan akan disita pada tanggal 7 Mei 2018 dengan pemasangan 13 (tiga belas) plang sita.
- Kendala penyidikan karena pencarian orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang. **KPK memfasilitasi pemulangan 5 orang yang masuk ke dalam DPO pada tahun 2019.** Antara lain atas nama terpidana Sugiarto Wiharjo alias Alay yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2019. Terpidana 18 tahun penjara dalam kasus penempatan dana APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur pada PTBPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung sebesar 119 Milyar rupiah yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Lampung berhasil ditangkap setelah difasilitasi oleh KPK.
- Untuk terpidana Sugiarto Wiharjo ini, KPK juga melakukan **penelusuran aset terkait eksekusi pidana uang pengganti**, dengan melakukan verifikasi terhadap 326 bidang berupa tanah dan bangunan, Zona Nilai Tanah yang sebesar Rp. 83,7 Miliar, dan pengecekan lokasi tanah dan bangunan yang berlokasi di Provinsi Lampung dan berlokasi di Provinsi Bali.
- Selain itu KPK juga **memfasilitasi penangkapan terpidana** Didi Supriadi yang kabur saat tahap penyidikan dan diputus bersalah secara in absentia. Dia dipidana penjara 8 tahun, denda Rp 200 juta dan uang pengganti Rp 12,3 Miliar. Didi adalah tersangka dalam dugaan TPK Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2010 di PT. BNI SKC Bandung pada peternakan sapi Grup Simpang Jaya Dua dengan Plafon Rp25 Miliar. yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Koordinasi Supervisi Pencegahan

- Saat ini KPK melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan di 34 provinsi dan 542 kabupaten/kota yang berada di bawahnya. Ada 8 fokus kegiatan pencegahan korupsi yang terus didampingi oleh KPK. Delapan fokus kegiatan tersebut:
 - a. Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa
 - c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - d. Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah
 - e. Manajemen Aparatur Sipil Negara
 - f. Manajemen Dana Desa
 - g. Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah
 - h. Manajemen Aset Daerah
- Dari proses pendampingan dalam 8 fokus pencegahan tersebut, tujuannya adalah menyelamatkan keuangan negara. Total optimalisasi pendapatan daerah dari hasil koordinasi dan supervise pencegahan selama 4 tahun adalah **Rp 29 Triliun**.
- KPK mendorong dan mengawal Pemda menagih pembayaran piutang pajak daerah & Penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Optimalisasi pendapatan daerah ini menghasilkan penagihan piutang daerah sebesar Rp 18,8 Triliun.
- Optimalisasi Pendapatan Daerah juga dilakukan dengan pemasangan alat rekam pajak untuk pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir sebanyak 9.109 alat, berhasil meningkatkan 12,9% pendapatan daerah atau setara dengan Rp930 miliar.
- KPK mengawal penyelesaian sengketa aset daerah dari konflik kepemilikan aset milik pemda dengan pihak swasta berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp4,8 triliun.

- KPK mendorong Pemda untuk menagih pengembang menyerahkan Fasum & Fasos, seperti jalan, taman, irigasi, pasar, RSUD, kepada pemda setempat. 826 dari 2051 aset yang sudah diselesaikan bernilai Rp 4,4 Triliun.

FUNGSI PENINDAKAN

16. Dari seluruh fungsi yang kami jalankan, fungsi penindakan adalah fungsi yang paling menyita perhatian. **Selama empat tahun, KPK melakukan** 498 penyelidikan; 539 penyidikan; 433 penuntutan; 286 inkracht; dan 383 eksekusi.

Selama empat tahun terakhir, ada **608 tersangka** yang kami tangani dalam berbagai modus perkara.

(INFOGRAFIS PENINDAKAN)

- Mulai tahun 2016, KPK melanjutkan **penanganan perkara EKTP** yang dimulai pada tahun 2014. Berangsur-angsur **sejak tahun 2016-2019 KPK menetapkan 12 tersangka lain** dalam perkara yang merugikan negara Rp2,3 triliun ini.
- Tahun 2019, KPK mengembangkan perkara pengadaan pesawat di **PT. Garuda Indonesia** (Persero) ke Tindak Pidana Pencucian Uang. Perkara ini memang membutuhkan waktu lebih lama, karena KPK perlu mengumpulkan banyak dokumen dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lintas negara.
- Pada Oktober 2019, kami menyelesaikan penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka TCW, Swasta. Fokus dari penanganan perkara TPPU ini adalah pada penelusuran arus uang sebagai bentuk upaya KPK mengembalikan aset yang dikorupsi ke negara (*asset recovery*). Sampai saat ini, KPK menyita sejumlah aset dengan nilai sekitar Rp500 Miliar.
- Selain bekerjasama dengan lembaga-lembaga di dalam negeri, KPK juga bekerjasama dengan beberapa institusi penegak hukum yang ada di luar negeri, khususnya dengan **CPIB di Singapura dan SFO di Inggris**.
- Untuk kasus **Bantuan Likuiditas Bank Indonesia**, saat ini KPK telah mengirimkan surat kepada SES NCB-Interpol Indonesia. Dalam surat tersebut KPK meminta bantuan pencarian melalui **Red Notice untuk dua tersangka** yang tak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.
- Di sektor migas, tahun ini KPK memulai penyidikan dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES) selaku *subsidiary company* PT. Pertamina (Persero)
- Penanganan kasus ini adalah bentuk komitmen KPK dalam mendukung pemerintah dalam menciptakan sektor migas yang bersih dari korupsi dan bisa bermanfaat untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Kasus Menjerat Korporasi

Selama tahun 2017-2019, KPK telah menetapkan **6 korporasi** sebagai tersangka. Penetapan tersangka pertama kali dilakukan pada tahun 2017 dengan menetapkan PT. DGI dalam TPK Pembangunan RS Pendidikan UDAYANA TA 2009- 2011.

Kegiatan Tangkap Tangan

Selama **4 tahun ini**, **KPK telah melakukan 87 Operasi Tangkap Tangan (OTT)**, dengan total tersangka awal setelah OTT adalah 327 orang;

Tahun	Jumlah OTT	Jumlah Tersangka
2016	17	58
2017	19	72
2018	30	121
2019	21	76
TOTAL	87	327

Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK tak pernah berhenti hanya pada perkara pokok. Dari OTT, KPK selalu mendapat petunjuk yang menjadi pembuka jalan ke dugaan perkara lain. Salah satu contohnya adalah OTT dalam perkara usulan dana perimbangan keuangan daerah. KPK kemudian menetapkan dua kepala daerah dan satu anggota DPR yang diduga terlibat dalam pengurusan dana perimbangan dalam APBN-P 2017 dan APBN 2018.

Ada pula OTT dalam perkara suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi yang kemudian menyeret Gubernur Jambi dan 11 anggota DPRD di provinsi yang sama.

Pengembangan dari OTT yang lain adalah dalam perkara KONI. Selain barang buktinya yang mencapai Rp7,4 miliar, perkara ini ikut menyeret Menteri Pemuda dan Olahraga yang diduga menerima sejumlah uang.

Sifat suap yang tertutup, pelaku memiliki kekuasaan dan alat bukti yang cenderung sulit didapatkan membuat praktek suap akan lebih dapat dibongkar melalui metode OTT. Selain itu, OTT dapat membongkar persekongkolan tertutup yang hampir tidak mungkin dibongkar dengan metode penegakan hukum konvensional.

Kami yakin, OTT selalu bisa menjadi petunjuk yang mengungkap kasus-kasus lain dan sampai saat ini selalu terbukti di Pengadilan.

17. Vonis pengadilan dan kekuatan hukum tetap untuk koruptor bukan tanda berakhirnya tugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain eksekusi, KPK harus melacak aset koruptor yang bersembunyi. Semua **aset harus kembali ke kas negara** untuk dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selama empat tahun terakhir, KPK melakukan **hibah dan lelang** terhadap barang-barang yang sudah ditetapkan menjadi milik negara.

(INFOGRAFIS LELANG)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pelaksanaan eksekusi selama 4 tahun sebesar **Rp 1,74 Triliun** berasal dari denda, uang pengganti, rampasan dan hibah Penetapan Status Penggunaan (PSP).

Tahun ini, kami menghadapi ujian dalam bentuk vonis kontroversial dalam kasus BLBI dan Direktur Utama PLN dalam TPK Dugaan Suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau-1.

Menanggapi putusan tersebut, kami telah mengajukan kasasi atas putusan untuk Dirut PLN dan tengah mempersiapkan pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung untuk putusan lepas untuk SAT dalam kasus BLBI.

KELEMBAGAAN & KERJASAMA INTERNASIONAL

18. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan usaha pemberantasan korupsi tak hanya di negeri sendiri. KPK membina kerja sama internasional untuk meningkatkan kualitas program, penerapan aturan, dan penanganan kasus dalam memberantas korupsi.

Sebagai negara yang meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Indonesia menjalani proses revidasi pada 2017 lalu. Indonesia ditinjau oleh Yaman dan Ghana.

Dalam peninjauan ini, KPK mengkoordinasikan 24 kementerian dan lembaga terkait dalam pengumpulan informasi dan penyusunan jawaban terhadap *self-assessment checklist* dan pelaksanaan *country visit* bulan Oktober 2017.

Tak hanya meratifikasi UNCAC, KPK juga mewakili Indonesia untuk hadir di beberapa pertemuan internasional. Antara lain dalam forum G-20 Anti-Corruption Working Group (ACWG), KPK bersama stakeholder terkait melakukan kajian transparansi Beneficial Ownership (BO) yang akan merumuskan rekomendasi dari beberapa aspek terutama kebijakan dan regulasi nasional sehingga memberi manfaat bagi penegakan hukum.

Tahun 2018, KPK menyampaikan inisiatif untuk melaksanakan pelatihan bersama negara anggota SEA-PAC saat pertemuan di Manila, Filipina, Juli 2018. KPK menyebarkan kuesioner kepada negara anggota SEA-PAC untuk mengidentifikasi isu bersama yang dihadapi oleh lembaga anti korupsi di Asia Tenggara. Jawaban kuesioner tersebut kemudian dianalisis untuk menjadi tema dalam kegiatan pelatihan bersama negara anggota SEA-PAC

Selain mengikuti forum kerja sama internasional, di dalam negeri, KPK melakukan inisiatif baru dalam pemberantasan korupsi. Tahun 2018, KPK menyusun Modul Penanganan TPPU Pasar Modal. KPK juga menginisiasi penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Manajemen Aset.

19. Semua pelaksanaan fungsi itu, kami lakukan bersama 1.634 pegawai dengan **anggaran sebesar Rp3,6 triliun selama empat tahun**. Dari anggaran tersebut, Rp 65,72 triliun telah dikembalikan ke kas negara, penyelamatan potensi kerugian negara atau peningkatan pendapatan negara / daerah.

(INFOGRAFIS ANGGARAN VS PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA)

20. Demikian kinerja KPK selama 4 tahun kepemimpinan kami. Di ujung tahun kepemimpinan kami ini, tidak berlebihan jika kami ungkapkan, inilah tahun terberat ketika KPK secara keseluruhan terasa seperti dikepung kepentingan anti pemberantasan korupsi. Namun, kami paham, kita tidak boleh menyerah kalah pada perlawanan balik koruptor (*corruptors fight back*) tersebut.

Sekali lagi, semua ini belum usai. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan di semua fungsi lembaga ini. Yang tidak kalah penting adalah menjaga marwah lembaga pemberantas korupsi ini dengan menguatkan integritas manusia di dalamnya. Meskipun ada perubahan signifikan mengenai kepegawaian, sudah semestinya fondasi yang dimiliki sebagai insan KPK tidak akan luntur.

Selamat bekerja, demi Indonesia sejahtera.

SELESAI